

CULTURAL BACKLASH DAN PERGESERAN PREFERENSI POLITIK WARGA MUHAMMADIYAH DALAM TRANSISI KEPEMIMPINAN JOKOWI-PRABOWO PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024

Rivaldi Mahardika¹, Athira Zahroh Firdausi Ramadhani², Hibatulloh Akbar Novianto³

^{1,2,3}Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Email Korespondensi: rivaldimahardika44@gmail.com

Email: athirazahroh@firdausi@gmail.com; barrnow@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the influence of materialist–*post-materialist* value orientation, cultural backlash, and elite perception on the voting preferences of Muhammadiyah's young members in the transition of leadership from Joko Widodo (Jokowi) to Prabowo Subianto in the 2024 Presidential Election. Based on the cultural backlash theory by Ronald Inglehart along with Norris & Inglehart (2019), the research frames the contest as a battle of two value axes: Jokowi as a symbol of *post-materialist* values (openness, participation) and Prabowo as a symbol of materialist values (stability, authority, order). The research uses a quantitative approach with an explanatory survey design. Data were collected from 63 members of the autonomous Muhammadiyah organization in the Special Region of Yogyakarta through a five-point Likert scale questionnaire and then analyzed using multiple linear regression. The model places value orientation (X1), cultural backlash (X2), and elite perception (X3) as independent variables, and voting preference (Y) as the dependent variable. The results show that the model is significant simultaneously ($F = 4.639$; $p = 0.0006$; $R^2 = 0.191$). However, partially, only the materialist–*post-materialist* value orientation has a significant influence ($\beta = 0.436$; $p = 0.001$), while cultural backlash ($\beta = 0.035$; $p = 0.807$) and elite perception ($\beta = -0.055$; $p = 0.702$) are not significant. These findings confirm that the political preferences of Muhammadiyah's young members are primarily driven by fundamental value orientations, rather than cultural reactions or elite influences. Cultural backlash among this group is diagnostic (awareness of threats) rather than restorative (triggering populist support). The research concludes that framing Jokowi as a *post-materialist* symbol and Prabowo as a materialist symbol has a clear and strong impact: the majority of *post-materialist*-oriented young Muhammadiyah members tend to maintain their affinity toward Jokowi's symbol and reject shifting to Prabowo's materialist symbolism.

Keywords: cultural reaction, election, Muhammadiyah, *post-materialist*, voting preference

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh orientasi nilai materialist–*post-materialist*, cultural backlash, dan persepsi elite terhadap preferensi memilih generasi muda Muhammadiyah dalam transisi kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024. Berpijak pada teori *cultural backlash* yang dikembangkan oleh Norris dan Inglehart, penelitian ini membingkai kontestasi sebagai pertarungan dua poros nilai: Jokowi sebagai simbol nilai *post-materialist* (keterbukaan, partisipasi) dan Prabowo sebagai simbol nilai materialist (stabilitas, otoritas, ketertiban). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Data dikumpulkan dari 63 anggota organisasi otonom Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kuesioner skala Likert lima poin lalu dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Model menempatkan orientasi nilai (X1), *cultural backlash* (X2), dan persepsi elite (X3) sebagai variabel bebas, serta preferensi memilih (Y) sebagai variabel terikat. Hasil menunjukkan bahwa model signifikan secara simultan ($F = 4,639$; $p = 0,0006$; $R^2 = 0,191$). Namun, secara parsial, hanya orientasi nilai *materialist–post-materialist* yang berpengaruh signifikan ($\beta = 0,436$; $p = 0,001$), sedangkan cultural backlash ($\beta = 0,035$; $p = 0,807$) dan persepsi elite (β

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

499

Indexed



= -0,055; $p = 0,702$) tidak signifikan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa preferensi politik generasi muda Muhammadiyah terutama digerakkan oleh poros nilai fundamental, bukan oleh reaksi kultural maupun pengaruh elite. Cultural backlash di kalangan ini bersifat diagnostik (kesadaran akan ancaman) bukan restoratif (pemicu dukungan populis). Penelitian menyimpulkan bahwa pembingkaiannya Jokowi sebagai simbol *post-materialist* dan Prabowo sebagai simbol *materialist* memiliki daya jelas yang kuat: mayoritas generasi muda Muhammadiyah yang berorientasi *post-materialist* cenderung mempertahankan afinitas terhadap simbol Jokowi dan menolak berpindah ke simbolisme *materialist* Prabowo.

Kata kunci: cultural backlash, Muhammadiyah, pemilu, *post-materialist*

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden 2024 menandai sebuah transisi yang khas dalam sejarah politik Indonesia kontemporer. Berakhirnya dua periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak menghasilkan kekosongan biasa, melainkan sebuah proses pengalihan legitimasi yang terkonsolidasi melalui dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Fenomena ini melahirkan narasi ‘politik berkelanjutan’ (*continuity politics*) sebagai tema sentral kampanye, di mana Prabowo diposisikan sebagai pewaris sah agenda pembangunan Jokowi (Aspinall & Mietzner, 2019; Warburton, 2020). Konfigurasi ini menarik karena pada Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi dan Prabowo berada pada poros yang berlawanan secara tajam, sehingga reposisi 2024 menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana basis pemilih memaknai perpindahan tersebut.

Dalam membaca kontestasi ini, penelitian ini mengajukan sebuah pembingkaiannya simbolik: Jokowi sebagai simbol nilai *post-materialist* dan Prabowo sebagai simbol *materialist*. Jokowi, dengan citra blusukan, kedekatan dengan rakyat, dan retorika pembangunan partisipatif, merepresentasikan nilai-nilai keterbukaan, partisipasi, dan ekspresi diri yang khas *post-materialist*. Sebaliknya, Prabowo, dengan latar belakang militer, retorika ketegasan, dan penekanan pada stabilitas serta kedaulatan nasional, merepresentasikan nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan otoritas yang khas *materialist*. Pembingkaiannya ini bukan klaim atas identitas personal kedua tokoh, melainkan konstruksi analitis untuk membaca preferensi pemilih melalui lensa teori nilai Inglehart.

Perilaku politik kelompok masyarakat sipil terorganisir menjadi objek kajian yang signifikan dalam konteks ini. Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam modernis terbesar kedua di Indonesia dengan basis massa terdidik perkotaan, menempati posisi strategis. Sejak didirikan K.H. Ahmad Dahlan pada 1912 di Yogyakarta, Muhammadiyah mengusung semangat pembaruan (*tajdid*) yang menempatkan rasionalitas dan ijtihad sebagai fondasi gerakannya (Burhani, 2018; Nakamura, 2012). Karakter modernis ini menjadikannya laboratorium sosial yang ideal untuk menguji bagaimana nilai-nilai modernitas berinteraksi dengan identitas keagamaan dalam membentuk preferensi politik. Secara kelembagaan, Muhammadiyah menganut prinsip ‘politik adiluhung’, yakni keterlibatan dalam politik kebangsaan tanpa terjebak politik praktik kepartaian sehingga preferensi individual anggotanya menjadi ruang otonom yang menarik untuk diteliti (Mu’ti & Burhani, 2019).

Kerangka teoritis utama penelitian ini adalah teori *cultural backlash* yang dikembangkan oleh Norris dan Inglehart (2019) dalam *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Teori ini merupakan pengembangan dari teori nilai *materialist-post-materialist* sebelumnya. Norris dan Inglehart berargumen bahwa keberhasilan populisme otoritarian di berbagai belahan dunia bukan semata fenomena ekonomi, melainkan reaksi kultural: kelompok yang merasa nilai tradisionalnya terancam oleh kemampuan nilai progresif bereaksi defensif dengan mendukung pemimpin yang menjanjikan restorasi tatanan lama. Tesis ini menjadi kerangka utama untuk menganalisis apakah kecemasan kultural mendorong generasi muda Muhammadiyah memilih Prabowo sebagai figur penjaga stabilitas dan tradisi.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kajian perilaku politik berbasis nilai berkembang pesat sejak karya Inglehart (1977). Inglehart mengajukan bahwa transformasi struktur ekonomi pasca-industri

menghasilkan pergeseran nilai antar generasi: generasi yang tumbuh dalam kelangkaan material memprioritaskan keamanan dan stabilitas, sedangkan generasi yang tumbuh dalam kemakmuran mengutamakan kebebasan dan partisipasi. Tesis ini diperkuat dalam karya-karya lain milik Inglehart yang memperluas analisis ke skala lintas-nasional melalui World Values Survey (Inglehart, 1977; Inglehart & Welzel, 2005). Sejumlah peneliti menerapkan kerangka ini pada konteks non-Barat dengan hasil beragam; dalam masyarakat Muslim, internalisasi nilai *post-materialist* sering berjalan beriringan dengan penguatan identitas religius, menantang asumsi sekularisasi teori modernisasi klasik (Norris & Inglehart, 2011). Fenomena ini dikenal sebagai ‘modernitas ganda’, di mana modernitas tidak menghapus agama dari ruang publik melainkan merekonfigurasi relasinya (Eisenstadt, 2000).

Dalam konteks Indonesia, penerapan tesis *cultural backlash* masih terbatas. Sebagian besar studi perilaku politik Islam berfokus pada faktor identitas keagamaan, patronase, dan mobilisasi elektoral (Bush, 2014; Latief, 2017; Mujani, Liddle, & Amardi, 2018). Sejumlah kajian menyoroti peran politik identitas keagamaan dalam kontestasi elektoral, terutama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, yang memperlihatkan bahwa kecemasan kultural dapat menjadi sumber daya politik (Hadiz, 2018; Mietzner & Muhtadi, 2018). Namun, kajian-kajian ini jarang menghubungkan fenomena tersebut dengan kerangka pergeseran nilai Inglehart secara sistematis. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengoperasionalkan *cultural backlash* sebagai konstruk terukur dan mengujinya bersama orientasi nilai dan persepsi elite dalam satu model regresi.

Dimensi persepsi elite menjadi relevan karena teori *elite cue*, Lupia dan McCubbins (1998), serta Zaller (1992) menjelaskan bagaimana warga menggunakan sinyal tokoh elite sebagai jalan pintas kognitif dalam pengambilan keputusan. Dalam transisi Jokowi–Prabowo, endorsement Jokowi berfungsi sebagai elite cue yang berpotensi mengarahkan preferensi. Namun, efektivitas sinyal ini bergantung pada kepercayaan terhadap pemberi sinyal dan kesesuaiannya dengan nilai dasar pemilih (Bullock, 2011). Literatur menunjukkan bahwa pemilih *post-materialist* dan terdidik cenderung lebih resisten terhadap elite cue karena mampu mengevaluasi kandidat secara independen, sebuah hipotesis kunci dalam penelitian ini, terutama mengingat adanya potensi disonansi simbolik ketika Jokowi (simbol *post-materialist*) mendukung Prabowo (simbol *materialist*).

Studi tentang Muhammadiyah dan politik menekankan karakter khas organisasi sebagai Gerakan Islam modernis yang menjaga jarak kelembagaan dari kontestasi elektoral langsung (Hilmi, 2010; Nakamura, 2012). Sikap netral ini tidak berarti warga Muhammadiyah apolitis; sebaliknya, tingkat kesadaran dan partisipasi politik mereka tergolong tinggi berkat tradisi kaderisasi sistematis melalui organisasi otonom. Tradisi ijtihad dan rasionalitas berpotensi menghasilkan pemilih reflektif, namun ikatan identitas keislaman juga dapat mengaktifkan sentimen kultural dalam konteks tertentu (Burhani, 2018). Inilah yang menjadikan generasi muda Muhammadiyah subjek penelitian yang ideal: cukup terdidik untuk memiliki orientasi nilai jelas, cukup religius untuk berpotensi mengalami kecemasan kultural, namun cukup otonom untuk tidak sekadar mengikuti arahan elite.

Kajian perilaku elektoral di Indonesia umumnya menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis, atau rasional (Mujani et al., 2018). Pendekatan berbasis nilai ala Inglehart relatif jarang diterapkan, padahal pendekatan ini menawarkan keunggulan dalam menjelaskan transformasi preferensi jangka panjang yang berakar pada pergeseran orientasi nilai antargenerasi. Penelitian terhadap masyarakat usia muda menjadi signifikan mengingat kelompok pemilih muda merupakan segmen elektoral terbesar pada Pemilu 2024, dengan proporsi mencapai lebih dari separuh daftar pemilih tetap nasional (KPU Republik Indonesia, 2024). Memahami logika preferensi politik kelompok ini memberikan kontribusi penting bagi pemetaan masa depan demokrasi Indonesia.

Konteks transisi juga harus dipahami dalam kerangka kondisi demokrasi Indonesia kontemporer. Sejumlah pengamat mencatat gejala kemunduran demokrasi (*democratic regression*) pada periode kedua Jokowi, ditandai pelemahan lembaga antikorupsi, penyempitan ruang sipil, dan menguatnya politik dinasti (Power, 2018; Warburton, 2020). Pencalonan Gibran Rakabuming Raka melalui putusan kontroversial

Mahkamah Konstitusi menjadi simbol paling nyata fenomena ini. Bagi generasi muda Muhammadiyah yang menjunjung nilai keadilan dan akuntabilitas, dinamika ini berpotensi menimbulkan dilema antara tarikan narasi keberlanjutan dan kekhawatiran terhadap erosi prinsip demokratis. Penelitian ini berupaya menangkap bagaimana ketegangan tersebut diolah dalam ruang nilai para responden.

Berdasarkan uraian tinjauan literatur di atas penelitian ini menempatkan diri pada persimpangan antara teori nilai global dan realitas politik lokal Indonesia. Studi ini berangkat dari premis bahwa preferensi politik merupakan resultan dari interaksi antara nilai dasar yang terinternalisasi, kecemasan kultural yang aktual, dan respons terhadap sinyal elite. Dengan menguji ketiga aspek ini secara simultan melalui analisis regresi pada populasi generasi muda Muhammadiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pusat historis dan intelektual Muhammadiyah penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa pengujian aplikabilitas teori *cultural backlash* Inglehart dalam konteks Islam modernis, sekaligus kontribusi praktis berupa pemahaman tentang dinamika preferensi politik generasi muda Muslim yang akan semakin menentukan arah demokrasi bangsa pada dekade mendatang.

Kajian-kajian mutakhir tentang populisme global memperluas tesis *cultural backlash* dengan menunjukkan bahwa reaksi kultural tidak bersifat seragam di seluruh konteks. Sejumlah peneliti mencatat bahwa karakteristik kelompok yang mengalami backlash tingkat pendidikan, modalitas keagamaan, dan kapasitas refleksi kritis memengaruhi apakah kecemasan kultural berujung pada dukungan populis atau justru penolakan reflektif. Dalam konteks demokrasi terkonsolidasi maupun yang sedang berkembang, kelompok terdidik dengan tradisi intelektual yang kuat cenderung mengolah kecemasan kultural secara lebih bernuansa. Premis ini relevan untuk Muhammadiyah, yang memiliki jaringan pendidikan tinggi terbesar di antara organisasi keagamaan Indonesia dan tradisi diskursus intelektual yang panjang. Maka, pertanyaan apakah backlash kultural di kalangan generasi muda Muhammadiyah berfungsi sebagai pemicu populisme atau sebagai kewaspadaan reflektif menjadi inti yang perlu diuji secara empiris.

Penelitian ini memilih teori *cultural backlash* dari Inglehart dan Norris sebagai kerangka utama karena kemampuannya menjelaskan dimensi yang jarang tersentuh dalam studi perilaku pemilih Indonesia, yakni pergeseran nilai lintas generasi sebagai penggerak preferensi elektoral. Berbeda dengan pendekatan patron-klien maupun politik identitas primordial yang mendominasi literatur domestik, kerangka *cultural backlash* menempatkan poros nilai post-materialist-materialist sebagai sumbu analitis, sehingga memungkinkan pembacaan terhadap orientasi nilai generasi muda bukan sekadar afiliasi organisasi atau kalkulasi material jangka pendek. Kerangka ini dinilai paling sesuai untuk menangkap dimensi afektif dan simbolik dari perilaku elektoral yang menjadi fokus penelitian ini, terutama pada segmen yang mengalami ketegangan antara loyalitas terhadap endorsement elite dan disposisi nilai personalnya.

Literatur tentang transisi kepemimpinan juga memberikan kerangka yang penting. Dalam studi suksesi politik, transfer dukungan dari incumbent populer kepada penerus pilihannya tidak selalu berjalan mulus. Keberhasilan transfer bergantung pada sejauh mana penerus dipersepsikan melanjutkan nilai-nilai yang dilekatkan pada incumbent. Ketika terdapat ketidaksesuaian citra, misalnya, *incumbent* yang dipersepsikan merakyat dan terbuka digantikan oleh figur yang dipersepsikan tegas dan hierarkis transfer legitimasi dapat terhambat, meskipun *endorsement* diberikan secara eksplisit. Hal ini menjadikan kasus Jokowi-Prabowo secara teoritis menarik kedua figur, meskipun kini berada dalam koalisi yang sama, secara historis dan simbolis merepresentasikan dua kutub nilai yang berbeda. Penelitian ini menguji apakah ketidaksesuaian simbolik tersebut tercermin dalam perilaku elektoral generasi muda Muhammadiyah.

Pada akhirnya, penting untuk ditegaskan bahwa pembingkaiannya Jokowi sebagai simbol *post-materialist* dan Prabowo sebagai simbol *materialist* dalam penelitian ini bersifat heuristik-analitis, bukan penilaian normatif atas kedua tokoh. Pembingkaiannya berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan poros teoritis Inglehart ke dalam konteks elektoral konkret. Citra Jokowi sebagai figur yang menekankan pembangunan partisipatif, keterbukaan komunikasi, dan kedekatan dengan rakyat akar rumput diasosiasikan dengan dimensi *post-materialist*. Sementara citra Prabowo sebagai figur yang menekankan keteguhan, kedaulatan, stabilitas, dan kepemimpinan kuat, diasosiasikan dengan dimensi *materialist*.

Dengan kerangka ini, penelitian dapat menguji secara langsung apakah pemilih dengan orientasi nilai tertentu cenderung tertarik pada kandidat yang mempersonifikasikan nilai tersebut sebuah pengujian yang jarang dilakukan dalam studi perilaku politik Indonesia berbasis kerangka Inglehart.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori yang dipilih untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat melalui analisis statistik inferensial. Populasi penelitian adalah generasi muda Muhammadiyah yang aktif dalam organisasi otonom (Ortom) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel berjumlah 63 responden yang dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria: terdaftar sebagai anggota atau aktivis Ortom Muhammadiyah, berusia 17-35 tahun, dan memiliki hak pilih pada Pilpres 2024. Secara demografis, responden didominasi oleh laki-laki (69,8%), dengan kelompok usia 21-25 tahun sebagai proporsi terbesar (54,0%), dan tersebar di seluruh kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert lima poin yang terdiri dari 29 item, mencakup empat dimensi, yakni: orientasi nilai *materialist/post-materialist* (8 item), *cultural backlash* (12 item), persepsi elite (4 item), dan preferensi memilih (5 item), kuesioner disusun berdasarkan operasionalisasi konsep dari teori *cultural backlash* Inglehart dan disebar secara daring menjelang dan setelah pelaksanaan Pilpres 2024. Sementara analisis data, dilakukan dalam tahap, yaitu: deskriptif (mean, standar deviasi, distribusi frekuensi), korelasi Pearson untuk pemetaan hubungan bivariat, dan regresi linear berganda untuk menguji model $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$, mencakup uji F, uji t, koefisien determinasi (R^2), serta koefisien beta terstandar. Uji asumsi klasik dilakukan melalui pemeriksaan multikolinearitas dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Variabel X_1 dikonstruksikan sebagai selisih dari skor *materialist* dikurangi dengan skor *post-materialist* (MAT-PMAT) dengan justifikasi teoritis bahwa keduanya bukan dimensi independen, tetapi dua kutub dari satu kontinum nilai dalam kerangka Inglehart. Konstruksi tersebut menghasilkan sebuah ukuran tunggal yang memungkinkan pengujian secara langsung atas pembingkai simbolik penelitian, di mana nilai positif menandakan dominasi orientasi *materialist* dan nilai negatif menandakan dominasi *post-materialist*.

PEMBAHASAN

Orientasi Nilai sebagai Penentu Utama

Hasil pengolahan data atas 63 responden menunjukkan skor rata-rata tiap dimensi sebagai berikut. Nilai *materialist* $\bar{M} = 2,92$ ($SD = 1,01$), nilai *post-materialist* $\bar{M} = 4,50$ ($SD = 0,52$), *cultural backlash* $\bar{M} = 3,32$ ($SD = 0,49$), persepsi elite $\bar{M} = 2,94$ ($SD = 0,87$), dan preferensi memilih Prabowo $\bar{M} = 2,72$ ($SD = 1,04$). Variabel komposit X_1 (MAT – PMAT) memiliki rata-rata $-1,58$ ($SD = 1,16$), menandakan mayoritas responden condong kuat ke *post-materialist*. Distribusi preferensi memilih: 12 responden (19,0%) cenderung mendukung Prabowo, 24 responden (38,1%) moderat, dan 27 responden (42,9%) cenderung tidak mendukung.

Pola deskriptif ini sudah memberikan indikasi awal yang penting. Skor *post-materialist* yang sangat tinggi ($\bar{M} = 4,50$) dengan standar deviasi yang kecil ($SD = 0,52$) menunjukkan adanya konsensus kuat di kalangan responden terhadap nilai-nilai keterbukaan dan partisipasi. Sebaliknya, skor *materialist* yang lebih rendah ($\bar{M} = 2,92$) dengan variasi yang lebih besar ($SD = 1,01$) menunjukkan bahwa orientasi *materialist* tersebar lebih heterogen. Skor *cultural backlash* yang berada pada titik tengah ($\bar{M} = 3,32$) mengindikasikan tingkat kecemasan kultural yang moderat tidak ekstrim, namun cukup hadir untuk diuji pengaruhnya. Adapun skor preferensi memilih Prabowo yang sedikit di bawah titik tengah ($\bar{M} = 2,72$) sejalan dengan komposisi sampel yang didominasi orientasi *post-materialist*. Distribusi preferensi yang condong ke arah penolakan (42,9% tidak mendukung) memberikan gambaran awal bahwa mayoritas responden menjaga jarak dari simbolisme *materialist* Prabowo.

Tabel 1: Statistika Deskriptif dan Korelasi Bivariat dengan Y (N = 63)

Variabel	Mean	SD	r dgn Y	p	Sig.
X1 — Materialist/Post-Mat.	-1,58	1,16	0,435	0,000	***
X2 — Cultural Backlash	3,32	0,49	0,136	0,287	n.s.
X3 — Persepsi Elite	2,94	0,87	0,062	0,627	n.s.
Y — Preferensi Memilih	2,72	1,04	—	—	(Terikat)

*** $p < 0,001$ | n.s. = tidak signifikan. Pembanding: MAT murni $r = 0,393$ ($p = 0,001$); PMAT murni $r = -0,207$ ($p = 0,104$).

Berdasarkan regresi atas model $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$ menghasilkan model yang signifikan secara simultan: $F(3,59) = 4,639$; $p = 0,006$. Model menjelaskan 19,1% varians preferensi memilih ($R^2 = 0,191$; Adjusted $R^2 = 0,150$). Secara parsial, hanya X1 yang berpengaruh signifikan ($\beta = 0,436$; $t = 3,542$; $p = 0,001$), sedangkan X2 ($\beta = 0,035$; $p = 0,807$) dan X3 ($\beta = -0,055$; $p = 0,702$) tidak signifikan. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh VIF di bawah 1,6, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas. Koefisien tidak terstandar X1 sebesar 0,389 dapat diinterpretasikan secara substantif, setiap kenaikan satu poin pada sumbu *materialist*, yaitu pergeseran satu poin ke arah *materialist* relatif terhadap *post-materialist* yang diasosiasikan dengan kenaikan sebesar 0,389 poin pada preferensi memilih Prabowo, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien beta terstandar sebesar 0,436 menempatkan X1 dalam kategori pengaruh sedang hingga kuat menurut konvensi statistik sosial. Sebaliknya, koefisien X2 dan X3 yang mendekati nol dan tidak signifikan menegaskan bahwa kedua variabel tersebut praktis tidak memberikan kontribusi dalam memprediksi preferensi memilih ketika X1 dikendalikan. Bahkan, koefisien X3 yang bertanda negatif, meskipun tidak signifikan, mengisyaratkan arah hubungan yang berlawanan dengan hipotesis semakin kuat persepsi *endorsement elite*, tetapi justru ada kecenderungan tipis ke arah penurunan dukungan Prabowo.

Tabel 2: Hasil Regresi Linear Berganda (Variabel Terikat: Y)

Variabel	B	Std.Error	β	t	Sig.
Konstanta	3,276	0,929	—	3,525	0,001
X1 — Materialist/Post-Mat.	0,389	0,110	0,436	3,542	0,001***
X2 — Cultural Backlash	0,074	0,303	0,035	0,245	0,807
X3 — Persepsi Elite	-0,065	0,168	-0,055	-0,385	0,702

$R^2 = 0,191$ | Adj $R^2 = 0,150$ | $F(3,59) = 4,639$ | $p = 0,006$ | *** $p < 0,001$ | VIF semua $< 1,6$.

Tabulasi Tipe Nilai dan Preferensi

Pengelompokan responden berdasarkan dominasi orientasi nilai memperkuat temuan regresi. Responden yang condong *materialist* (simbol Prabowo) menunjukkan rata-rata preferensi $Y = 3,27$, lebih tinggi dibanding kelompok *post-materialist* (simbol Jokowi) dengan $Y = 2,69$. Meski kelompok *materialist* hanya 3 orang, dua diantaranya (66,7%) mendukung Prabowo, sedangkan dari 60 responden *post-materialist* hanya 16,7 yang mendukung.

Pada dimensi *post-materialist*, indikator tertinggi adalah keterbukaan pemerintah terhadap kritik ($\bar{M} = 4,71$; 95,2% setuju) dan perluasan partisipasi publik ($\bar{M} = 4,52$; 93,7% setuju). Pada dimensi *cultural backlash*, indikator diagnostik berskor tinggi: perubahan sosial terlalu cepat ($\bar{M} = 3,79$; 68,3% setuju), pengaruh budaya asing mengikis identitas ($\bar{M} = 3,79$; 63,5% setuju), dan generasi muda meninggalkan

agama ($\bar{M} = 3,71$; 61,9% setuju). Sebaliknya, indikator restoratif berskor rendah, yakni keinginan kembali ke nilai tradisional ($\bar{M} = 2,97$) dan modernisasi membawa dampak negatif ($\bar{M} = 2,95$). Pada dimensi persepsi elite, indikator EC1 (Prabowo kandidat Jokowi) tinggi ($\bar{M} = 3,81$; 66,7% setuju), namun indikator pengaruh elite pada pilihan pribadi rendah (EC3: $\bar{M} = 2,48$; hanya 15,9% setuju). Pada dimensi preferensi memilih, terdapat penurunan konsisten dari indikator abstrak (VP1: $\bar{M} = 3,25$) ke indikator konkret (VP5: $\bar{M} = 2,32$).

Tabel 3: Tabulasi Tipe Orientasi Nilai x Preferensi Memilih

Tipe Orientasi Nilai	N	Mean Y	Tidak Dukung	Moderat	Dukung
Materialis (simbol Prabowo)	3	3,27	1	0	2 (66,7%)
Post-Materialis (simbol Jokowi)	60	2,69	26	24	10 (16,7%)
TOTAL	63	2,72	27	24	12 (19,0%)

Pola per indikator ini sangat informatif, karena mengungkap struktural internal dari masing-masing dimensi. Pada dimensi *cultural backlash*, kontras tajam antara indikator diagnostik yang tinggi ($\bar{M}$ di atas 3,7) dan indikator restoratif yang rendah ($\bar{M}$ di bawah 3,0) merupakan bukti empiris paling kuat bahwa backlash di kalangan responden bersifat diagnostik, bukan restoratif. Responden secara mayoritas menyadari dan mengkhawatirkan perubahan sosial, namun mayoritas yang sama menolak gagasan kembali ke masa lalu atau menolak modernisasi. Inilah inti dari temuan kualitatif yang memperkuat hasil regresi. Sementara itu, pada dimensi persepsi elite kesenjangan antara EC1 (kesadaran akan *endorsement* tinggi) dan EC3 (kesediaan mengikuti arahan elite rendah) secara langsung menggambarkan disonansi simbolik yang menjadi topik utama penelitian ini. Adapun penurunan konsisten skor preferensi dari indikator abstrak ke konkret menunjukkan bahwa simpati umum terhadap gagasan keberlanjutan tidak diterjemahkan menjadi dukungan elektoral konkret terhadap Prabowo semakin spesifik dan personal pertanyaannya, semakin rendah dukungannya.

Hasil regresi memberikan jawaban tegas atas pertanyaan penelitian pertama: orientasi nilai materialist-post-materialist (X1) merupakan satu-satunya prediktor signifikan preferensi memilih ($\beta = 0,436$; $p = 0,001$), sehingga hipotesis pertama (H1) terdukung kuat. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin condong *materialist* orientasi seseorang, semakin tinggi kecenderungan memilih Prabowo. Temuan ini memvalidasi pembingkai simbolik penelitian, bahwa Prabowo berfungsi sebagai magnet elektoral bagi pemilih *materialist* yang mengutamakan stabilitas, ketertiban, dan kepemimpinan kuat sebagaimana dikonseptualisasikan (Inglehart, 1977). Dalam kerangka *cultural backlash*, (Norris & Inglehart, 2011). menegaskan bahwa poros *materialist* dan *post-materialist* merupakan sumbu fundamental yang membelah preferensi politik kontemporer, dan data penelitian ini mengonfirmasi relevansi sumbu tersebut dalam konteks Indonesia.

Korelasi bivariat memperkuat arah hubungan ini: skor materialist berkorelasi positif dengan dukungan Prabowo ($r = 0,393$), sedangkan skor *post-materialist* berkorelasi negatif ($r = -0,207$). Tabulasi tipe nilai (Tabel 4) memperlihatkan kontras yang dramatis, kelompok materialist memiliki rata-rata preferensi Prabowo ($Y = 3,27$) yang jauh lebih tinggi dibanding kelompok *post-materialist* ($Y = 2,69$). Mayoritas responden (95,2%) yang berorientasi *post-materialist* menunjukkan resistensi terhadap Prabowo, dengan hanya 16,7% yang mendukung. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa generasi muda Muhammadiyah, sebagai pengusung nilai *post-materialist*, cenderung mempertahankan orientasi yang lebih dekat dengan simbolisme Jokowi dibandingkan berpindah ke simbolisme materialist Prabowo.

Signifikansi dari temuan ini menjadi lebih jelas, ketika dibandingkan dengan ketidaksignifikan dua variabel lainnya. Dalam sebuah model yang memuat tiga variabel bebas, fakta bahwa hanya orientasi nilai yang bertahan sebagai prediktor signifikan sementara *cultural backlash* dan persepsi elite gugur,

menunjukkan bahwa poros nilai bukan sekadar salah satu faktor di antara banyak faktor, melainkan faktor dominan yang menyerap daya jelas dari variabel lain. Ketika orientasi nilai dikendalikan, kontribusi kecemasan kultural dan pengaruh elite menjadi praktis nihil. Ini mengindikasikan bahwa apa yang tampak sebagai pengaruh *backlash* atau elite dalam analisis bivariat sederhana sesungguhnya dimediasi atau diserap oleh orientasi nilai yang lebih fundamental. Dengan kata lain, orientasi nilai *materialist* dan *post-materialist* berfungsi sebagai struktur dasar yang membentuk cara generasi muda Muhammadiyah memproses baik kecemasan kultural maupun sinyal elite. Temuan ini memberikan dukungan empiris yang kuat bagi klaim sentral teori Inglehart bahwa nilai dasar merupakan fondasi dari berbagai sikap dan perilaku politik turunan.

Jokowi sebagai Simbol *Post-Materialist*, Prabowo sebagai Simbol *Materialist*

Pembingkaiannya simbolik yang menjadi inti penelitian ini menemukan dukungan empiris yang kuat. Kontestasi 2024 dapat dibaca sebagai pertarungan dua kutub nilai yang dipersonifikasikan oleh kedua tokoh. Ketika sumbu *materialist* menguat dalam diri seseorang pemilih, daya tarik Prabowo meningkat; sebaliknya, ketika nilai *post-materialist* menguat nilai yang diasosiasikan dengan citra Jokowi dukungan terhadap Prabowo menurun. Pola ini mengukuhkan bahwa preferensi politik generasi muda Muhammadiyah beroperasi dalam logika nilai, bukan sekadar logika tokoh patronase. Temuan ini memperkaya literatur perilaku politik Indonesia yang selama ini didominasi pendekatan sosiologis dan patronase dengan menunjukkan bahwa poros nilai Inglehart memiliki daya jelas yang signifikan (Mujani et al., 2018; Pepinsky, Liddle, & Mujani, 2018).

Hal ini menjadi menarik secara teoritis, karena dominasi nilai *post-materialist* ($\bar{M} = 4,50$) di kalangan generasi muda Muhammadiyah berpadu dengan identitas keislaman yang kuat sebuah konfirmasi atas konsep 'modernitas ganda' dan sanggahan terhadap asumsi sekularisasi klasik (Eisenstadt, 2000; Norris & Inglehart, 2011). Muhammadiyah, dengan tradisi pembaruan dan rasionalitasnya, menjadi ruang sosial yang kondusif bagi internalisasi nilai *post-materialist* tanpa mengorbankan komitmen keagamaan. Inilah yang membuat generasi muda Muhammadiyah menjadi pemilih yang kritis terhadap figur yang dipersepsikan *materialist-otoritarian*, sekalipun figur tersebut membawa label keislaman atau didukung oleh tokoh yang mereka hormati.

Temuan ini juga dapat dipahami melalui lensa hipotesis sosialisasi yang dikembangkan oleh Inglehart (1977). Generasi muda Muhammadiyah yang menjadi responden penelitian ini tumbuh dalam era pasca-Reformasi periode dimana kebebasan berekspresi, partisipasi politik, dan keterbukaan informasi menjadi norma yang relatif mapan. Sosialisasi dalam lingkungan yang relatif aman dan terbuka ini, sesuai prediksi teori Inglehart, menghasilkan internalisasi nilai *post-materialist* yang kuat dan tahan lama. Ditambah dengan pengalaman Pendidikan tinggi yang menjadi ciri khas kader Muhammadiyah, terbentuklah profil pemilih yang tidak hanya memegang nilai *post-materialist* tetapi juga memiliki kapasitas kognitif untuk mengevaluasi kandidat secara independen. Kombinasi nilai dan kapasitas inilah yang menjelaskan resistensi mereka terhadap simbolisme *materialist* Prabowo, sekaligus menegaskan bahwa pergeseran nilai antargenerasi yang diteorikan Inglehart benar-benar termanifestasikan dalam perilaku elektoral konkret di Indonesia kontemporer.

Cultural Backlash: Diagnostik, Bukan Restoratif

Pertanyaan penelitian kedua memperoleh jawaban yang menentang tesis *backlash* klasik. Cultural backlash (X2) ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi memilih ($\beta = 0,035$; $p = 0,807$), sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Padahal, dalam tesis Norris dan Inglehart (2019), kecemasan kultural seharusnya menjadi pendorong kuat dukungan terhadap kandidat populis-konservatif. Mengapa hal ini tidak terjadi pada generasi muda Muhammadiyah? Jawabannya terletak pada karakter *backlash* mereka yang bersifat diagnostik, bukan restoratif. Analisis per indikator menunjukkan bahwa responden menyadari ancaman kultural perubahan sosial cepat ($\bar{M} = 3,79$), pengaruh budaya asing ($\bar{M} = 3,79$) namun

tidak menginginkan kemunduran ke tatanan lama, sebagaimana tercermin dari rendahnya skor indikator restoratif seperti keinginan kembali ke nilai tradisional ($\bar{M} = 2,97$).

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori cultural backlash dalam konteks Islam modernis. Cultural backlash di kalangan generasi muda Muhammadiyah berfungsi sebagai “alarm identitas” yang memicu kewaspadaan, namun tidak otomatis menjadi “tombol pemicu” dukungan elektoral pada kandidat materialist. Dengan kata lain, backlash kultural dan preferensi elektoral merupakan dua domain yang dalam populasi ini relatif terpisah. Hal ini sejalan dengan tradisi tajdid Muhammadiyah yang menekankan pembaruan reflektif (Burhani, 2018): kesadaran akan ancaman kultural diolah secara kritis, bukan diluapkan dalam pelarian politik ke figur otoritarian. Temuan ini menantang generalisasi tesis *backlash* dari konteks Barat ke konteks Muslim Indonesia, dan menunjukkan bahwa mekanisme backlash sangat dipengaruhi oleh karakter intelektual dan keagamaan kelompok yang mengalaminya.

Perbandingan dengan konteks Barat yang menjadi basis tesis yang dikembangkan oleh (Norris dan Inglehart (2011) memperjelas kekhasan temuan ini. Di Amerika Serikat dan Eropa, cultural backlash terdokumentasi mendorong dukungan terhadap Trump dan Gerakan Brexit karena kelompok yang mengalami kecemasan kultural umumnya adalah generasi tua dengan Pendidikan lebih rendah yang merasa terpinggirkan oleh perubahan nilai progresif. Sebaliknya, dalam penelitian ini, kelompok yang diteliti adalah generasi muda terdidik dengan orientasi post-materialist yang dominan. Profil demografis dan intelektual yang berbeda secara fundamental ini menjelaskan mengapa mekanisme backlash tidak beroperasi dengan cara yang sama. Kecemasan kultural yang dialami generasi muda Muhammadiyah lebih merupakan ekspresi kepedulian terhadap arah perubahan sosial sebuah bentuk refleksivitas modern ketimbang penolakan reaksioner terhadap modernitas itu sendiri. Inilah yang menjadikan temuan penelitian relevan bagi diskusi lebih luas tentang batas-batas aplikabilitas teori sosial Barat konteks Global South.

Persepsi Elite: Endorsement Tanpa Konversi

Pertanyaan penelitian ketiga juga memperoleh jawaban yang mengungkap paradoks penting. Persepsi elite (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi memilih ($\beta = -0,055$; $p = 0,702$), bahkan koefisiennya bertanda negatif, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Meskipun 66,7% responden percaya bahwa Prabowo adalah kandidat dukungan Jokowi (EC1: $\bar{M} = 3,81$), persepsi ini tidak terkonversi menjadi dukungan elektoral. Indikator yang mengukur pengaruh elite pada pilihan pribadi justru rendah mempertimbangkan arah elite ($\bar{M} = 2,48$; hanya 15,9% setuju). Ini menegaskan bahwa endorsement Jokowi tidak cukup kuat mengalihkan pemilih ke Prabowo.

Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai ‘disonansi simbolik’, yakni Jokowi merupakan simbol post-materialist, sedangkan Prabowo merupakan simbol materialist. Pemilih *post-materialist* yang menyukai Jokowi tidak serta-merta memindahkan dukungan ke Prabowo hanya karena endorsement, karena keduanya merepresentasikan poros nilai yang berlawanan. Temuan ini sejalan dengan literatur *elite cue* bahwa sinyal elite hanya efektif bila selaras dengan nilai dasar pemilih (Bullock, 2011; Zaller, 1992). Dalam kasus ini, transfer legitimasi dari Jokowi ke Prabowo terhambat oleh ketidaksesuaian nilai pemilih post-materialist tidak dapat dengan mudah menerima kandidat yang dipersepsikan materialist, meskipun didukung tokoh yang mereka kagumi. Ketegangan inilah yang menjelaskan mengapa narasi ‘politik keberlanjutan’ tidak sepenuhnya berhasil di kalangan generasi muda Muhammadiyah.

Implikasi temuan ini terhadap narasi politik berkelanjutan sangat signifikan. Strategi kampanye 2024 yang menempatkan Prabowo sebagai penerus Jokowi mengandaikan bahwa popularitas Jokowi dapat ditransfer secara langsung ke penerusnya. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pada segmen muda terdidik, transfer semacam ini menghadapi hambatan struktural berupa ketidaksesuaian nilai. Endorsement berhasil membentuk persepsi kognitif, yakni mayoritas responden mengetahui dan mempercayai bahwa Prabowo didukung Jokowi, namun gagal membentuk preferensi afektif-elektoral. Pemilih *post-materialist* tampaknya membedakan secara tajam antara menghormati Jokowi sebagai figur

dan menerima Prabowo sebagai pilihan. Perbedaan ini mencerminkan kematangan politik yang menolak reduksi pilihan elektoral menjadi efektif sebagai instrumen legitimasi di tingkat wacana publik dibandingkan sebagai mekanisme konversi suara di tingkat individu pemilih muda dan terdidik.

Sintesis: Pertarungan Nilai, Bukan Pertarungan Tokoh

Secara keseluruhan, model regresi yang signifikan ($F = 4,639$; $p = 0,006$; $R^2 = 0,191$) menegaskan bahwa preferensi memilih generasi muda Muhammadiyah dalam transisi Jokowi–Prabowo terutama digerakkan oleh orientasi nilai dasar, bukan *cultural backlash* maupun persepsi elite. Temuan ini memurnikan tesis Inglehart, dalam konteks ini, yang paling menentukan bukan reaksi kultural atau pengaruh tokoh, tetapi poros nilai fundamental yang membedakan pemilih *materialist* dan *post-materialist*. Meskipun R^2 sebesar 0,191 menunjukkan bahwa masih terdapat 80,9% varians yang dijelaskan faktor lain di luar model seperti faktor ekonomi, kedaerahan, atau jaringan sosial kontribusi efektif dalam model ini hampir seluruhnya berasal dari X1.

Implikasi teoritis terpentingnya adalah bahwa kontestasi 2024 di kalangan generasi muda Muhammadiyah merupakan pertarungan nilai, bukan sekadar pertarungan tokoh. Prabowo memenangkan hati pemilih *materialist* yang mendambakan ketertiban dan otoritas; Jokowi melalui simbolisme *post-materialist* tetap menjadi jangkar nilai bagi mayoritas generasi muda Muhammadiyah yang menolak berpindah haluan. *Cultural backlash* dan *endorsement elite*, yang dalam teori diharapkan menjembatani perpindahan ini, ternyata tidak cukup kuat menandingi kekuatan poros nilai fundamental. Generasi muda Muhammadiyah, dengan modal intelektual dan keagamaan yang khas, memperlihatkan semacam *cognitive immunity* terhadap mobilisasi populis berbasis kecemasan kultural, sekaligus otonomi penilaian yang tinggi terhadap sinyal elite (Mu'ti & Burhani, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa preferensi memilih generasi muda Muhammadiyah dalam transisi Jokowi–Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024, terutama ditentukan oleh orientasi nilai *materialist–post-materialist*. Dari tiga variabel yang diuji, orientasi nilai (X1) berpengaruh signifikan ($\beta = 0,436$; $p = 0,001$), sementara, *cultural backlash* (X2) dan persepsi elite (X3) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, masing-masing ($p = 0,807$) dan ($p = 0,702$). *Cultural Backlash* dalam populasi ini bersifat diagnostik, yakni: kesadaran atas ancaman kultural yang tidak terkonversi menjadi dukungan politik, sementara persepsi elite terhambat oleh disonansi simbolik antara Jokowi dan Prabowo sebagai dua simbol nilai yang berlawanan.

Pembingkai Jokowi sebagai simbol *post-materialist* dan Prabowo sebagai simbol *materialist* terbukti memiliki kapasitas *explanatory power* yang tinggi, mayoritas responden berorientasi *post-materialist* cenderung mempertahankan ketertarikan terhadap simbolisme Jokowi dan menolak berpindah ke simbolisme Prabowo. Temuan ini sekaligus menjadi kontribusi teoritis utama dalam penelitian, proposisi inti Inglehart bahwa kecemasan kultural mendorong dukungan populis tidak terbukti di kalangan muslim modernis terdidik yang justru menunjukkan bahwa *backlash* yang bersifat reflektif dan tidak berujung pada kecenderungan otoritarian. Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa generasi muda Muhammadiyah atau bahkan generasi muda muslim terdidik Indonesia secara luas, merupakan aktor politik yang berorientasi nilai, reflektif, dan otonom. Sehingga tidak mudah digerakkan oleh kecemasan kultural maupun sinyal elite, dan berpedoman pada poros nilai fundamental yang telah terinternalisasi. Dalam konteks masa depan demokrasi Indonesia, kehadiran segmen elektoral semacam ini merupakan sebuah indikator yang menggembirakan terkait dengan ketahanan rasionalitas dan kemandirian penilaian di tengah arus personalisasi politik dan godaan populisme.

REFERENSI

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>
- Bullock, J. G. (2011). Elite influence on public opinion in an informed electorate. *American Political Science Review*, 105(3), 496–515. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000165>
- Burhani, A. N. (2018). Outlook of Muhammadiyah: liberalism, pluralism and islamism. *Studia Islamika*, 25(3), 433–470.
- Bush, R. (2014). Muhammadiyah and Disaster Response: Innovation and Change in Humanitarian Assistance. In *Natural Disaster Management in the Asia-Pacific: Policy and Governance* (pp. 33–48). Springer. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55157-7_3
- Eisenstandt, S. N. (2000). Multiple Modernities. *Daendalus Journal of The American Academy of Arts and Sciences*, 129(1), 1–29.
- Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>
- Hilmi, M. (2010). *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Pasir Panjang, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Inglehart, R. (1977). *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*. New Jersey, UK: Princeton University Press. [https://doi.org/10.12968/s1471-115x\(23\)70274-2](https://doi.org/10.12968/s1471-115x(23)70274-2)
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy The Human Development Sequence - Frontmatter*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- KPU Republik Indonesia. (2024). *Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum 2024*. Jakarta, Indonesia: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Latief, H. (2017). Marketizing piety through charitable work: Islamic charities and the islamization of middle-class families in Indonesia. In *Religion and the Morality of the Market: Anthropological Perspectives* (pp. 196–216). Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316888704.010>
- Lupia, A., & McCubbins, M. D. (1998). *The Democratic Dilemma: Can Citizens Learn What They Need to Know?* Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Mu'ti, A., & Burhani, A. N. (2019). The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to The First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 111–134. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Amardi, K. (2018). *Voting Behavior in Indonesia Since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Nakamura, M. (2012). *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, C. 1910-2010* (2nd Enlarg). Pasir Panjang, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). <https://doi.org/10.2307/1570797>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2011). *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (Second Edi). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Pepinsky, T. B., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2018). *Piety and Public Opinion: Understanding Indonesian Islam*. New York, USA: Oxford University Press.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Warburton, E. (2020). Deeping Polarization and Democratic Decline in Indonesia. In *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers* (pp. 25–40). Carneie: Endowment for International Peace. <https://doi.org/10.5040/9780815750819.ch-008>
- Zaller, J. R. (1992). *The Nature and Origins of Mass Opinion*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.